

Analisis Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam di Desa Waiheru (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya)

Analysis of Non-Performing Loans at the Savings and Loan Cooperative in Waiheru Village (Case Study of Dwi Eka Jaya Multi-Purpose Cooperative)

Imelda Dina Warbanaran¹, Maryoni Stevanny Kainama^{1*}, Theodora Florence Tomaso¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Penulis Korespondensi: ✉kainama.m@gmail.com lat.am@gmail.com

Article Info

Kata Kunci:

kredit bermasalah,
koperasi, analisis
risiko

Keyword:

*non-performing loans,
cooperative, risk
analysis*

Article history:

Received: 14-02-2024

Revised: 21-03-2024

Accepted: 23-05-2024

Published: 30-05-2024

Abstrak

Koperasi simpan pinjam berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun kerap menghadapi tantangan berupa kredit bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya di Desa Waiheru. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 13 responden yang mengalami kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan enam faktor utama penyebab kredit bermasalah, yaitu penyalahgunaan dana kredit, watak tidak baik, gagal panen, kendala usaha, musibah, melarikan diri, serta penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa peningkatan pendapatan. Kesimpulan menegaskan pentingnya penilaian calon debitur secara menyeluruh dan penguatan sistem pengawasan internal koperasi untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah. Temuan ini menambah pemahaman tentang dinamika risiko pada koperasi lokal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pelatihan analisis kredit, pendampingan kepada anggota, serta penguatan prosedur penilaian kelayakan kredit untuk mendukung keberlanjutan koperasi.

Abstract

Savings and loan cooperatives play a crucial role in supporting community economies, but often face challenges related to non-performing loans that can impact the cooperative's financial health. This study aims to identify the factors causing non-performing loans at Dwi Eka Jaya Multi-Business Cooperative in Waiheru Village. A case study employing a descriptive qualitative approach was conducted, utilising observation, interviews, and documentation with 13 respondents who experienced problematic loans. The results reveal six main factors: misuse of loan funds, poor character, crop failure, business constraints, misfortune, escape, and additional borrowing from other institutions without an increase in income. The findings underscore the need for thorough debtor assessments and enhanced internal supervision systems to mitigate credit risk. These insights provide a deeper understanding of risk dynamics in local cooperatives. The implications suggest the need for credit analysis training, member assistance, and strengthened creditworthiness assessment procedures to support cooperative sustainability.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan sentral dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia. Keberadaan koperasi memberikan akses pembiayaan yang relatif mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang sulit dijangkau oleh lembaga perbankan formal, sehingga koperasi mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan usaha produktif masyarakat kecil (Rahman, 2022). Dengan mekanisme simpan pinjam berbasis kekeluargaan dan gotong royong, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemupukan modal, tetapi juga sebagai instrumen edukasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif serta berkelanjutan.

Namun, seiring dengan meningkatnya peran koperasi sebagai sumber pembiayaan, tantangan besar muncul dalam pengelolaan risiko kredit, khususnya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Kredit bermasalah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan koperasi karena dapat mengganggu likuiditas, menurunkan profitabilitas, dan bahkan memicu terjadinya kebangkrutan apabila tidak ditangani dengan baik (Utami, 2023). Penyebab utama munculnya kredit bermasalah di koperasi antara lain lemahnya analisis kelayakan kredit, kurangnya pengawasan internal, hingga minimnya pemahaman anggota mengenai kewajiban pembayaran. Jika tidak dikelola secara profesional, kredit bermasalah akan menurunkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi, serta menghambat peran koperasi sebagai institusi penggerak ekonomi desa.

Khusus di Desa Waiheru, Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya menjadi salah satu koperasi simpan pinjam yang aktif melayani kebutuhan modal anggota dari berbagai latar belakang usaha. Dalam praktiknya, koperasi ini kerap menghadapi persoalan kredit bermasalah yang cukup kompleks, terutama akibat lemahnya seleksi debitur serta pengawasan pasca pencairan dana (Sari, 2021). Beberapa anggota mengalami gagal bayar karena penggunaan dana yang tidak produktif, sementara sebagian lainnya

mengalami kendala pembayaran akibat faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha atau bencana alam (Anggraini, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya sistem seleksi kredit dan monitoring pinjaman yang lebih ketat agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan sejak awal.

Selain faktor internal koperasi, karakteristik sosial ekonomi masyarakat Desa Waiheru juga turut mempengaruhi tingkat kredit bermasalah. Masih banyak anggota koperasi yang belum memiliki pemahaman cukup mengenai manajemen keuangan, sehingga penggunaan pinjaman seringkali tidak sesuai tujuan awal dan berdampak pada terhambatnya proses pengembalian (Fadilah, 2023). Keterbatasan literasi keuangan dan kebiasaan mengandalkan pendapatan musiman membuat anggota rentan terhadap gagal bayar saat terjadi penurunan penghasilan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia di jajaran pengurus koperasi menyebabkan fungsi edukasi dan pendampingan anggota belum optimal dalam mencegah dan menangani kredit bermasalah (Wibowo, 2021).

Fenomena kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam telah menjadi perhatian banyak peneliti. Studi oleh Pratama (2021) menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan kredit dipengaruhi oleh kualitas analisis kredit dan ketepatan monitoring. Penelitian Mustika (2020) menemukan bahwa faktor sosial seperti hubungan personal antara petugas koperasi dan anggota juga memengaruhi kepatuhan pembayaran. Penelitian Saputra (2023) menunjukkan perlunya inovasi produk dan edukasi keuangan untuk menekan rasio kredit bermasalah. Sementara Lestari (2022) menyoroti pentingnya penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) dalam seleksi debitur serta penguatan sistem manajemen risiko secara menyeluruh di koperasi desa.

Meskipun literatur tentang kredit bermasalah di koperasi cukup banyak, sebagian besar masih berfokus pada koperasi di wilayah perkotaan atau koperasi dengan skala usaha besar (Nugraha, 2022). Penelitian pada koperasi desa, khususnya dengan karakter sosial ekonomi anggota yang

heterogen dan tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, masih sangat terbatas. Belum banyak kajian yang secara spesifik membahas hubungan antara sistem seleksi, monitoring, serta peran edukasi keuangan dalam mengurangi risiko kredit bermasalah di koperasi pedesaan (Rizki, 2023). Kondisi ini menuntut perlunya eksplorasi lebih lanjut terkait strategi pencegahan dan penanganan kredit bermasalah di koperasi desa yang berbasis pada kearifan lokal dan kekeluargaan.

Penelitian ini mengangkat analisis baru mengenai strategi pencegahan dan penanganan kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya Desa Waiheru dengan pendekatan partisipatoris. Fokus utama kajian adalah pada penguatan sistem seleksi debitur, perbaikan prosedur monitoring pinjaman, dan inovasi edukasi keuangan berbasis komunitas. Penelitian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengurus, anggota, dan lembaga eksternal guna menciptakan sistem tata kelola koperasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal, serta mengidentifikasi faktor kunci yang dapat mengurangi risiko kredit bermasalah di koperasi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya di Desa Waiheru serta menyusun strategi penanganan yang relevan dengan karakteristik lokal. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, memperkuat literasi keuangan anggota, serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya di Desa Waiheru. Studi kasus ini dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata dan terperinci tentang kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara detail setiap faktor yang memengaruhi terjadinya kredit

bermasalah, baik dari sisi nasabah maupun dari kebijakan internal koperasi, serta mendalami bagaimana koperasi menangani permasalahan yang muncul.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para nasabah Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya yang mengalami kredit bermasalah, serta karyawan atau pengelola koperasi yang terlibat dalam proses penyaluran, pemantauan, dan penagihan kredit. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria terlibat langsung dalam transaksi kredit dan pengelolaan masalah kredit macet. Objek penelitian berlokasi di Desa Waiheru, Ambon, dengan fokus utama pada kasus-kasus kredit yang menunggak dan belum terselesaikan, baik karena faktor internal maupun eksternal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi di koperasi serta interaksi antara petugas dan nasabah. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan bebas dengan nasabah yang bermasalah serta pihak pengelola koperasi, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penyebab dan dampak kredit bermasalah. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis, seperti laporan keuangan, daftar kredit bermasalah, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah informasi relevan sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik yang memperlihatkan pola-pola penyebab kredit bermasalah. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi atau solusi yang dapat diterapkan koperasi untuk menekan risiko kredit bermasalah ke depan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan melakukan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam kasus

kredit bermasalah. Selain itu, peneliti juga memastikan konsistensi data dengan melakukan cross-check pada berbagai dokumen serta memperpanjang waktu pengamatan dan pengumpulan data di lapangan agar hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ragam Produk Kredit Koperasi

Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya menyediakan beragam produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi anggotanya. Produk-produk tersebut di antaranya kredit kapasitasasi, kredit usaha produktif, serta kredit umum atau serba-serbi. Kredit kapasitasasi diorientasikan pada peningkatan kapasitas usaha, baik dalam bentuk investasi aset produksi, sarana-prasarana, maupun pengembangan teknologi usaha anggota. Kredit usaha produktif difokuskan pada penguatan modal kerja yang diproyeksikan untuk membiayai kegiatan usaha dengan imbal hasil langsung, sedangkan kredit umum atau serba-serbi dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif maupun produktif, sesuai kebutuhan anggota.

Setiap produk kredit memiliki jangka waktu, syarat pembayaran, dan skema pengembalian yang berbeda, sehingga turut membentuk ragam motif penggunaan dana pinjaman oleh anggota. Namun demikian, tidak semua pemanfaatan dana berjalan optimal sesuai tujuan kredit, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya kredit bermasalah.

B. Uraian Kasus Kredit Bermasalah

Di bawah ini disajikan deskripsi terperinci dari 13 kasus kredit bermasalah yang dialami oleh anggota koperasi. Setiap uraian kasus disusun berdasarkan data hasil wawancara, dokumentasi administrasi koperasi, serta pengamatan langsung terhadap perilaku pembayaran masing-masing anggota.

1. Anggota A menerima fasilitas kredit umum/serba-serbi dengan tujuan awal yang disampaikan adalah untuk pengembangan usaha kecil. Namun, dalam praktiknya, penggunaan dana kredit dialihkan sepenuhnya untuk membayar biaya pendidikan anak. Konsekuensinya, dana pinjaman tidak digunakan secara

produktif yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru, sehingga tidak tersedia sumber pendanaan untuk mengembalikan pinjaman. Anggota A mengalami kesulitan dalam membayar angsuran secara rutin. Berdasarkan keterangan, anggota menyadari bahwa penyalahgunaan dana kredit menjadi penyebab utama munculnya tunggakan.

2. Anggota NB adalah penerima kredit usaha produktif dengan latar belakang sebagai petani padi. Kredit yang diperoleh ditujukan sebagai modal usaha dalam meningkatkan hasil pertanian. Akan tetapi, NB mengalami gagal panen akibat cuaca buruk dan serangan hama, sehingga pemasukan utama keluarga terhenti. Tidak ada pekerjaan alternatif yang bisa menjadi sumber penghasilan tambahan, sehingga seluruh pengembalian pinjaman sangat tergantung pada hasil panen. Akibatnya, NB mengalami kesulitan serius dalam membayar angsuran.
3. Anggota DN. Kasus kredit bermasalah yang menimpa DN dipicu oleh kelalaian dalam pengelolaan keuangan pribadi. DN tidak menerapkan pencatatan anggaran dan jadwal pembayaran yang disiplin. Setiap bulan, DN sering kali lupa atau terlambat membayar angsuran, meskipun secara ekonomi masih mampu melunasi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama adalah rendahnya literasi keuangan dan manajemen waktu yang kurang efektif.
4. Anggota NE termasuk dalam kategori anggota dengan moral hazard tinggi. Setiap kali petugas koperasi melakukan penagihan ke rumah, NE tidak pernah dapat ditemui. Informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar menunjukkan bahwa NE sengaja menghindari proses penagihan dan tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan. Kasus seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi di lingkungan koperasi.
5. Anggota LS memperoleh kredit umum/serba-serbi untuk keperluan konsumsi keluarga. Namun, musibah besar menimpa keluarga LS, sehingga dana pinjaman dan sisa pendapatan digunakan untuk penanganan situasi darurat. Akibatnya, LS tidak lagi mampu

- memenuhi kewajiban angsuran. Faktor eksternal seperti musibah seringkali tidak dapat diantisipasi, sehingga koperasi harus melakukan kebijakan khusus dalam penanganan kasus seperti ini.
6. Anggota W menghadapi kendala serupa dengan DN, yakni masalah kelalaian administratif. W tidak menyusun sistem pengingat atau catatan pembayaran, sehingga kerap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Padahal, dari sisi pendapatan, W masih dinilai mampu memenuhi kewajiban. Kasus W mempertegas pentingnya edukasi keuangan dasar bagi seluruh anggota koperasi.
 7. Anggota WN adalah pelaku usaha kecil yang menerima kredit usaha produktif. Dalam perjalanannya, WN mengalami masalah serius pada usaha, baik dari segi pemasaran maupun harga bahan baku yang terus naik. Akibatnya, pendapatan usaha WN menurun drastis, sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman secara teratur. Keterbatasan modal dan akses pasar memperburuk situasi keuangan anggota.
 8. Anggota LP juga tergolong sebagai anggota dengan risiko moral hazard. Setiap kali petugas melakukan penagihan, LP selalu menghindar dan tidak berada di rumah. Perilaku ini menimbulkan kesulitan tambahan bagi koperasi, baik secara administratif maupun psikologis bagi petugas. LP tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan meskipun sudah dilakukan beberapa kali pendekatan.
 9. Anggota NC, penerima kredit kapasitasasi, juga tidak menunjukkan niat untuk membayar angsuran pinjaman. Setiap kali dilakukan penagihan, NC bersikap pasif dan tidak memberikan respons positif terhadap upaya penyelesaian kredit. Ketidakpedulian terhadap kewajiban pembayaran merupakan tantangan besar dalam sistem kredit berbasis kepercayaan yang diadopsi koperasi.
 10. Anggota AM hampir identik dengan LP, di mana anggota secara aktif menghindari penagihan dan tidak pernah bisa dihubungi saat jadwal pembayaran. Meskipun sudah dilakukan berbagai pendekatan personal maupun administrasi, AM tetap tidak membayar kewajiban kreditnya hingga akhirnya masuk dalam daftar kredit bermasalah.
 11. Anggota VW menerima kredit kapitalisasi, namun sejak awal sudah menunjukkan sikap tidak berkomitmen untuk membayar. Dalam beberapa kali konfirmasi, VW secara terbuka menyampaikan ketidakinginannya untuk melunasi kredit yang telah diterima. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme seleksi anggota penerima kredit di koperasi.
 12. Anggota II. Berbeda dengan anggota lain, II menolak memberikan keterangan terkait penyebab keterlambatan pembayaran angsuran. Tidak ada informasi yang dapat diperoleh, baik dari pihak II sendiri maupun keluarga terdekatnya. Koperasi pun tidak mampu mengidentifikasi penyebab pasti, sehingga kasus II tetap tidak terklasifikasi secara jelas.
 13. Anggota AL adalah pelaku usaha kecil di bidang perdagangan sayuran. Selama periode kredit, AL mengalami penurunan omset akibat persaingan ketat dengan pedagang besar. Hasil penjualan sayuran tidak habis terjual, menyebabkan pendapatan AL menurun tajam. Akibatnya, AL tidak mampu mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit usaha produktif yang diterima.

C. Rekapitulasi Data Kredit Bermasalah

Tabel berikut menyajikan rangkuman kasus kredit bermasalah berdasarkan inisial anggota, jumlah pinjaman, jenis masalah, dan keterangan tambahan yang menjelaskan secara rinci latar belakang maupun kronologis terjadinya permasalahan kredit. Dengan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan identitas anggota, tabel ini memberikan gambaran sistematis mengenai variasi masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu, mulai dari penyalahgunaan dana, gagal panen, kelalaian administratif, hingga moral hazard dan kendala usaha. Penambahan kolom keterangan memberikan konteks tambahan agar pembaca dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat

rekapitulasi data, tetapi juga sebagai sarana analisis mendalam untuk memetakan pola dan tren kredit bermasalah di lingkungan koperasi.

Tabel 4.5. Rangkuman Penyebab Kredit Bermasalah pada Anggota Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya (Inisial)

| No | Inisial | Jumlah Pinjaman (Rp) | Jenis Masalah | Keterangan |
|----|---------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | A | 1.800.000 | Penyalahgunaan dana | Dana untuk pendidikan, tidak produktif, tidak ada pengembalian dari usaha. |
| 2 | NB | 1.273.000 | Gagal panen | Sumber pendapatan hilang karena panen gagal, tidak ada usaha sampingan. |
| 3 | DN | 360.000 | Kelalaian pembayaran | Lupa atau lalai membayar angsuran, tanpa masalah ekonomi. |
| 4 | NE | 1.200.000 | Melarikan diri | Tidak pernah bisa ditemui saat penagihan, menghindari secara aktif. |
| 5 | LS | 2.400.000 | Musibah keluarga | Dana dialihkan untuk kebutuhan mendesak akibat musibah, tidak sanggup membayar. |
| 6 | W | 360.000 | Kelalaian pembayaran | Tidak teratur mencatat atau membayar angsuran, pendapatan sebenarnya cukup. |
| 7 | WN | 480.000 | Kendala usaha | Penurunan omset, harga pemasok naik, gagal bayar angsuran. |
| 8 | LP | 600.000 | Melarikan diri | Tidak pernah bisa dihubungi, selalu menghindari penagihan. |
| 9 | NC | 1.200.000 | Tidak ada niat membayar | Tidak responsif dan tidak menunjukkan itikad baik, enggan memenuhi kewajiban. |
| 10 | AM | 600.000 | Melarikan diri | Menghindari petugas, tidak aktif dalam komunikasi pembayaran. |
| 11 | VW | 300.000 | Tidak ada niat membayar | Mengakui tidak berminat membayar, sejak awal tidak berkomitmen pada pembayaran. |
| 12 | II | 960.000 | Tidak diketahui | Tidak memberikan keterangan, koperasi gagal identifikasi masalah. |
| 13 | AL | 300.000 | Kendala usaha, persaingan pasar | Omset usaha menurun drastis, sayuran tidak terjual, tidak mampu membayar angsuran. |

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya, 2019

D. Analisis Deskriptif Kategori Penyebab Kredit Bermasalah

Berdasarkan pemetaan kasus di atas, dapat diidentifikasi beberapa kelompok utama penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada anggota Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya:

1. Penyalahgunaan Dana Kredit. Anggota yang mengalihkan penggunaan dana kredit dari tujuan produktif ke tujuan konsumtif (seperti A) umumnya mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman karena tidak ada

pendapatan tambahan yang dihasilkan dari dana tersebut.

2. Faktor Eksternal (Gagal Panen, Musibah, Kendala Usaha). Anggota dengan latar belakang usaha mikro dan sektor pertanian, seperti NB dan AL, sangat rentan terhadap risiko gagal panen dan persaingan pasar. Faktor eksternal lain, seperti musibah yang dialami LS, juga berperan besar dalam menurunkan kemampuan anggota untuk melunasi kredit.

3. Kelalaian Administratif. Kasus DN dan W menyoroti pentingnya sistem pengingat, pencatatan anggaran, dan edukasi keuangan. Kelalaian administrasi yang berulang dapat menimbulkan tunggakan tanpa disertai permasalahan ekonomi yang mendasar.
4. Moral Hazard (Menghindar & Tidak Ada Niat Membayar). Kelompok anggota seperti NE, LP, NC, AM, dan VW masuk dalam kategori risiko moral hazard, di mana terdapat ketidakpatuhan dan tidak adanya niat baik untuk membayar. Mereka secara aktif menghindari petugas atau bahkan secara terbuka menyampaikan ketidakinginannya untuk melunasi kewajiban.
5. Tidak Teridentifikasi. Kasus II memperlihatkan adanya keterbatasan sistem pencatatan dan keterbukaan anggota, sehingga penyebab kredit bermasalah tetap tidak dapat dipastikan.

E. Profil Kredit Berdasarkan Produk

Data di atas juga memperlihatkan distribusi kredit bermasalah pada tiga produk utama koperasi:

- Kredit usaha produktif lebih sering mengalami masalah karena kendala usaha dan gagal panen (NB, WN, AL).
- Kredit umum/serba-serbi kerap bermasalah karena penyalahgunaan dana dan musibah keluarga (A, LS).
- Kredit kapasitasasi, kapitalisasi, dan kredit lain lebih sering menghadapi moral hazard, di mana anggota tidak berkomitmen pada pembayaran (NC, VW).

F. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Anggota

Anggota yang mengalami kredit bermasalah umumnya berasal dari kelompok ekonomi mikro, dengan usaha utama di sektor pertanian, perdagangan kecil, atau pekerja informal. Minimnya pendapatan alternatif dan rendahnya literasi keuangan memperbesar risiko terjadinya tunggakan angsuran. Pada sisi perilaku, ditemukan anggota yang abai terhadap kewajiban pembayaran, bahkan cenderung menghindari komunikasi dengan koperasi.

Koperasi menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus menjaga nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan, di sisi lain perlu menegakkan

prinsip tata kelola yang disiplin untuk menjaga kelangsungan dana bergulir.

G. Evaluasi Sistem Monitoring Pembayaran

Berdasarkan berbagai kasus yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring pembayaran di koperasi masih memiliki kelemahan struktural yang cukup signifikan. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi potensi tunggakan. Ketiadaan pengingat otomatis—baik melalui pesan singkat, notifikasi aplikasi, maupun media lainnya—menyebabkan anggota sering kali lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, kurangnya edukasi keuangan menjadikan banyak anggota tidak memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran serta pentingnya menjaga reputasi kredit di dalam koperasi.

Ketidakjelasan dalam penegakan sanksi terhadap anggota yang menunggak juga membuat proses penagihan kehilangan kekuatan regulatif. Tanpa aturan yang tegas dan konsisten, anggota yang menunggak merasa tidak memiliki risiko atau beban moral yang cukup untuk segera melunasi kewajibannya. Di sisi lain, kelemahan dalam dokumentasi dan transparansi, seperti pencatatan manual, keterlambatan pelaporan, atau tidak adanya akses data secara real-time, memperburuk peluang penyelesaian tunggakan. Untuk itu, koperasi perlu segera membangun sistem monitoring yang terintegrasi dengan teknologi informasi, disertai edukasi yang masif, serta menerapkan kebijakan sanksi dan insentif yang transparan dan adil agar sistem pembayaran berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

H. Tantangan Administratif dan Sosial

Petugas koperasi sering kali berada dalam posisi sulit ketika menjalankan tugas penagihan, terutama jika harus menghadapi anggota yang tidak kooperatif, menunda-nunda pembayaran, atau bahkan sengaja menghindar. Situasi ini tidak hanya menimbulkan tekanan administratif, seperti beban kerja tambahan dan ketidaksesuaian target penagihan, tetapi juga berdampak secara psikologis. Rasa frustrasi, stres, hingga kelelahan emosional dapat muncul akibat interaksi yang tidak bersahabat dengan anggota, apalagi jika tidak ada dukungan

sistemik dari manajemen koperasi. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini dapat menurunkan semangat kerja, merusak relasi sosial antara petugas dan anggota, serta memengaruhi kualitas pelayanan koperasi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi perlu memberikan dukungan berkelanjutan kepada petugas melalui pelatihan komunikasi efektif, penguatan keterampilan mediasi, serta sistem pelaporan yang transparan dan melindungi petugas dari konflik personal. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem penagihan digital dan notifikasi otomatis, juga dapat mengurangi intensitas konfrontasi langsung dan mempercepat proses pembayaran. Selain itu, sistem insentif yang adil serta mekanisme dukungan psikologis—seperti sesi konseling atau forum berbagi pengalaman—akan membantu menjaga motivasi dan kesejahteraan petugas lapangan, sehingga mereka tetap dapat bekerja secara profesional dan beretika.

I. Pentingnya Literasi Keuangan dan Pendampingan Usaha

Banyak kasus kredit bermasalah di koperasi terjadi bukan semata karena ketidakmampuan membayar, tetapi lebih sering disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan anggota, terutama dalam mengelola keuangan rumah tangga dan usaha. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, seperti penganggaran, pencatatan arus kas, dan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, menyebabkan dana kredit kerap digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau tidak produktif. Oleh karena itu, koperasi perlu merancang program pelatihan keuangan yang terstruktur, mencakup pengelolaan kas, pencatatan usaha sederhana, serta edukasi penggunaan dana kredit secara produktif. Program ini tidak hanya akan mengurangi risiko kredit bermasalah, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Selain pelatihan, pendampingan usaha secara berkala sangat dibutuhkan, terutama bagi anggota yang menjalankan usaha mikro atau rumahan. Melalui pendekatan ini, koperasi dapat memantau perkembangan usaha, memberikan solusi atas hambatan operasional, dan membantu perencanaan ekspansi secara realistis. Pengembangan

komunitas usaha mikro di lingkungan koperasi juga dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan antaranggota. Dengan terciptanya ekosistem yang saling mendukung, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan finansial anggotanya

J. Upaya Preventif Kredit Bermasalah

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, koperasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi calon penerima kredit. Proses seleksi harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan yang mendalam, baik dari sisi kemampuan finansial, rekam jejak pembayaran, maupun komitmen terhadap nilai-nilai koperasi. Hanya anggota yang benar-benar layak, disiplin, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi yang seharusnya mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, penting bagi koperasi untuk melibatkan unsur edukasi keuangan dalam proses seleksi, agar calon penerima kredit memahami kewajiban dan risiko yang menyertai fasilitas pembiayaan yang diterima.

Penguatan sistem monitoring juga menjadi prioritas utama. Koperasi dapat mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif, seperti kunjungan lapangan berkala, audit internal terjadwal, dan pemantauan otomatis terhadap status angsuran menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Implementasi sistem *reward and punishment* yang adil dan konsisten juga perlu ditegakkan untuk mendorong kedisiplinan anggota serta memberikan efek jera bagi yang melanggar. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi pencatatan transaksi, notifikasi pembayaran otomatis, serta akses pelaporan daring akan mempercepat arus informasi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi risiko gagal bayar

K. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya Desa Waiheru dipengaruhi oleh enam faktor utama: penyalahgunaan dana kredit, watak tidak baik, gagal panen, kendala usaha, musibah, melarikan diri, dan

penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa diikuti penambahan pendapatan. Temuan ini menyoroti bahwa risiko kredit tidak hanya bersumber dari karakter peminjam, tetapi juga dari dinamika usaha dan faktor eksternal yang sulit dikendalikan (Putra et al., 2022). Penyalahgunaan dana kredit cenderung terjadi pada anggota yang memanfaatkan dana untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif, sehingga menyebabkan ketidakmampuan membayar angsuran secara tepat waktu (Dewi & Nurlina, 2024).

Selain itu, ketidaktepatan petugas koperasi dalam menganalisis kelayakan kredit juga menjadi penyumbang tingginya tingkat kredit bermasalah. Koperasi seringkali tidak melakukan verifikasi pendapatan dengan cermat sehingga terjadi mismatch antara kemampuan membayar dan besaran kredit yang diberikan. Dampaknya, koperasi harus menyediakan cadangan kerugian piutang lebih besar dan mengalami penurunan tingkat kesehatan keuangan. Tantangan ini juga diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal, yang seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan dana dan menekan risiko moral hazard (Rahman & Sari, 2023).

Pemberian kredit yang tidak didukung analisis menyeluruh menyebabkan tingginya angka kredit macet. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyoroti pentingnya aspek character, capacity, capital, collateral, dan conditions dalam evaluasi debitur. Studi oleh Sari et al. (2021) membuktikan bahwa implementasi prinsip 5C secara konsisten mampu menekan rasio kredit bermasalah. Namun, pada koperasi di Waiheru, aspek character dan capacity sering diabaikan sehingga risiko gagal bayar tetap tinggi (Wibowo & Latifah, 2023).

Aspek pengelolaan risiko dan edukasi anggota juga terbukti menjadi kunci dalam menurunkan angka kredit bermasalah. Koperasi yang secara aktif melakukan pelatihan keuangan dan penyuluhan risiko kredit kepada anggota terbukti memiliki tingkat kolektibilitas kredit yang lebih baik (Santosa et al., 2024). Temuan ini konsisten dengan studi Fadilah dan Syahputra (2023) yang menyarankan perlunya pendampingan intensif bagi debitur berisiko tinggi untuk meningkatkan literasi keuangan dan disiplin membayar angsuran.

Penelitian-penelitian terdahulu juga mengidentifikasi faktor eksternal seperti gagal panen, musibah, dan kendala usaha sebagai penyebab utama kredit bermasalah pada koperasi sektor pertanian dan usaha mikro. Studi oleh Anwar et al. (2021) dan Prasetyo (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan akses asuransi pertanian dan minimnya cadangan dana darurat membuat anggota rentan terhadap risiko yang berdampak langsung pada kemampuan membayar kredit. Hal ini diperkuat oleh temuan Lestari dan Handayani (2022) bahwa diversifikasi sumber pendapatan anggota dapat menurunkan risiko gagal bayar.

Dibandingkan dengan hasil penelitian pada koperasi lain, pola masalah kredit bermasalah di Waiheru menunjukkan kemiripan, terutama terkait lemahnya verifikasi data dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana kredit. Penelitian oleh Nuraini et al. (2022) dan Yusuf & Kartika (2024) juga menemukan bahwa tingkat pengawasan yang rendah berkontribusi terhadap tingginya angka penyelewengan penggunaan kredit dan moral hazard di tingkat anggota koperasi. Pola ini menjadi perhatian utama dalam perbaikan sistem manajemen risiko koperasi.

Implikasi utama dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan akuntansi, manajemen risiko, dan penguatan sistem verifikasi kelayakan kredit (Putra et al., 2022; Dewi & Nurlina, 2024). Penerapan sistem monitoring berbasis teknologi serta audit internal berkala sangat diperlukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini (Rahman & Sari, 2023; Sari et al., 2021). Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga asuransi dan pendampingan usaha bagi anggota koperasi dapat membantu memitigasi risiko eksternal seperti gagal panen dan musibah.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi konkret bagi pengelola koperasi untuk lebih selektif dalam menilai karakter dan kapasitas anggota sebelum pemberian kredit, serta melakukan pembinaan intensif terhadap anggota berisiko tinggi (Santosa et al., 2024; Fadilah & Syahputra, 2023). Perbaikan sistem reward and punishment, diversifikasi produk kredit, dan pengembangan dana cadangan juga

menjadi strategi kunci dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi jangka panjang (Lestari & Handayani, 2022; Yusuf & Kartika, 2024).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang relatif kecil dan fokus pada satu koperasi di Desa Waiheru, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh koperasi simpan pinjam di daerah lain. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan gambaran yang mendalam namun kurang memberikan data kuantitatif untuk analisis statistik lebih lanjut. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode campuran dan melibatkan lebih banyak koperasi serta data longitudinal. Rekomendasi utama adalah koperasi perlu meningkatkan sistem analisis kredit, melakukan pelatihan rutin kepada anggota dan pengurus, serta mengadopsi teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi agar dapat meminimalisasi risiko kredit bermasalah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Permasalahan kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Dwi Eka Jaya di Desa Waiheru telah dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan menggali faktor-faktor utama penyebab munculnya kredit macet. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana, watak tidak baik, gagal panen, kendala usaha, musibah, hingga melarikan diri, menjadi penyebab dominan yang menghambat pelunasan pinjaman anggota koperasi. Hasil analisis juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip 5C dalam proses seleksi kredit dan perlunya evaluasi mendalam atas kemampuan dan karakter calon peminjam. Studi ini menegaskan kontribusi ilmiah dengan memberikan gambaran konkret mengenai dinamika kredit bermasalah di koperasi tingkat desa, serta memperkaya pemahaman tentang manajemen risiko keuangan pada koperasi. Implikasi hasil penelitian ini mendorong koperasi untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana, serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Rekomendasi diberikan agar koperasi mengadopsi sistem penilaian kredit yang lebih ketat dan proaktif dalam edukasi keuangan kepada anggota untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Sari, D. P., & Rachmawati, L. (2021). Analisis ketahanan petani terhadap risiko gagal panen dan akses keuangan mikro. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.24843/jepa.2021.v5i2.145>
- Anggraini, Y. (2022). Strategi koperasi desa dalam mengatasi kredit bermasalah pada usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, 9(1), 65–78. <https://doi.org/10.31289/jeki.v9i1.1354>
- Dewi, A. R., & Nurlina, S. (2024). Penyalahgunaan dana kredit: Studi kasus pada koperasi simpan pinjam di Indonesia Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.36778/jakd.v6i1.2024.033>
- Fadilah, N. (2023). Literasi keuangan dan peran gender dalam pengelolaan kredit rumah tangga di kawasan semi-urban. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(3), 225–238. <https://doi.org/10.52389/jpek.2023.10.3.225>
- Fadilah, N., & Syahputra, D. (2023). Efektivitas pendampingan keuangan dalam menurunkan kredit bermasalah koperasi. *Jurnal Keuangan dan Pemberdayaan*, 11(2), 189–203. <https://doi.org/10.31289/jkp.v11i2.203>
- Lestari, H. R., & Handayani, T. (2022). Diversifikasi pendapatan anggota koperasi untuk menurunkan risiko gagal bayar. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.31289/jsep.v8i2.112>
- Mustika, E. (2020). Dimensi sosial dalam kelancaran kredit koperasi: Relasi petugas dan anggota. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 41–52. <https://doi.org/10.21009/jish.091.041>
- Nugraha, F. (2022). Manajemen risiko koperasi skala besar: Tinjauan implementasi prinsip 5C. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Koperasi*, 7(2), 198–212. <https://doi.org/10.26418/jmbk.v7i2.198>
- Nuraini, S., Wulandari, R., & Pramana, D. (2022). Moral hazard dalam kredit mikro koperasi: Perspektif pengurus. *Jurnal Akuntabilitas dan Manajemen Koperasi*,

- 5(3), 88–102.
<https://doi.org/10.31289/jamkop.v5i3.088>
- Prasetyo, A. (2023). Risiko usaha mikro pada koperasi petani: Antisipasi gagal panen dan asuransi pertanian. *Jurnal Agribisnis dan Koperasi*, 4(4), 165–178.
<https://doi.org/10.14710/jakp.v4i4.165>
- Pratama, R. D. (2021). Ketepatan monitoring kredit dan keberhasilan pengelolaan pinjaman koperasi. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 12(2), 134–146.
<https://doi.org/10.31289/jemikro.v12i2.146>
- Putra, M. Y., Ramadhani, S., & Arifin, R. (2022). Kelemahan verifikasi kredit koperasi dan dampaknya terhadap piutang macet. *Jurnal Manajemen Keuangan Mikro*, 6(1), 95–108.
<https://doi.org/10.36787/jmkm.v6i1.095>
- Rahman, A. (2022). Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kewilayahan*, 3(2), 77–89.
<https://doi.org/10.20885/jpwk.vol3.iss2.art4>
- Rahman, A., & Sari, M. (2023). Sistem pengawasan internal koperasi: Upaya meminimalisasi risiko kredit. *Jurnal Akuntansi dan Etika Bisnis*, 7(2), 121–134.
<https://doi.org/10.25078/jaeb.v7i2.121>
- Santosa, M. A., Wulandari, N., & Riyadi, B. (2024). Pendidikan keuangan sebagai strategi kolektibilitas kredit koperasi desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 55–68.
<https://doi.org/10.15294/jpeb.v14i1.055>